
ARTICLE

Partisipasi *Civil society* dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kegiatan Minggu Mruput di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu)

Dodi Al Nahyan¹, Dedy Hermawan², Nana Mulyana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Lampung

How to cite: Nahyan, D. A., Hermawan, D., Mulyana, N. (2022). Partisipasi *Civil society* dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kegiatan Minggu Mruput di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu) *Administrativa* (4) 3

Article History

Received: 7 Januari 2022

Accepted: 2 Desember 2022

Keywords:

Good Governance, Civil society, Partisipasi, Minggu Mruput

Kata Kunci:

Civil society, Pengukuran Partisipasi Civil society Pringsewu, Community

ABSTRACT

Economic empowerment of the community by instilling social values is very important to develop in order to improve the welfare and standard of living of the community which was originally not good for the better. The application of good governance instruments in the implementation of the mruput week is very important in supporting the success of empowerment programs and the achievement of good governance, by combining the interrelationships of three main pillars, namely government, corporations and society. measured by the theory of participation in the form of non-physical participation and physical participation, and is a qualitative research. The data collection technique in this study was through interviews, observations, and documentation with data analysis techniques using qualitative descriptive in the form of words, pictures, and not numbers. The results of this study are useful as information for organizations to assess and improve the performance of civil society and government in the future.

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menanamkan nilai sosial sangat penting dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang semula tidak baik menjadi lebih baik. Penerapan instrument *good governance* pada pelaksanaan minggu mruput sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan dan tercapainya pemerintahan yang baik, dengan menggabungkan keterkaitan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan keterlibatan *civil society* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diukur dengan teori dalam partisipasi dari bentuknya yaitu partisipasi secara non fisik dan partisipasi secara fisik, dan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi organisasi untuk menilai dan meningkatkan kinerja *civil society* dan pemerintah pada masa yang akan datang.

* Corresponding Author
Email : dodidodi522@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dan juga merupakan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam good governance dimana dijelaskan betapa pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat guna mendukung program pemerintahan yang baik. Dalam lingkup kehidupan masyarakat pedesaan terdapat suatu sistem ekonomi kerakyatan, pengertian dasar ekonomi kerakyatan adalah aturan ekonomi yang bersifat tradisional dengan basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun pengembangan sumberdaya manusia secara baik dan maksimal sebagai bagian dari usaha kecil dan menengah (UKM) baik dari sektor perdagangan, perkebunan, perikanan, kerajinan dan lainnya sebagai sumber pendapatan.

Pringsewu merupakan Kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Lampung Indonesia. Pringsewu disahkan menjadi Kabupaten pada rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008, sebagai pemekaran wilayah dan otonomi daerah dari Kabupaten Tanggamus. Pringsewu terletak 37 kilometer sebelah Barat dari Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung. Saat ini Pringsewu menjadi Kabupaten dengan berdiri sendiri karena perkembangan dan kemajuannya yang cukup bagus baik dari segi pendapatan daerah, taraf ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dan pendidikan bagi masyarakatnya. (Pringsewukab.co.id).

Bertekad dari keyakinan dengan melihat potensi SDM dan letak Geografis Kabupaten Pringsewu yang strategis, Pada 27 Oktober 2017 lahirlah suatu gagasan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil mengundang partisipasi yang sangat tinggi bagi seluruh elemen masyarakat. Kegiatan tersebut diberi nama Minggu Mruput yang berarti "Minggu pagi-pagi". Minggu Mruput bisa disebut juga sebagai pasar tradisional dengan balutan nuansa alam yang menyajikan makanan dan minuman serta mainan tradisional dan berbagai macam kerajinan. Latar belakang dari adanya gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memberikan pemahaman untuk memberdayakan masyarakat sekaligus membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah akan ketersediaannya lapangan pekerjaan dan juga kesenjangan sosial.

Pelopop program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut didasari oleh Pringsewu Community. Pringsewu Community merupakan *civil society* yang mempunyai visi misi memajukan dan mengembangkan Kabupaten Pringsewu menjadi lebih baik, dengan keanggotaan berasal dari masyarakat yang berdomisili asli di Kabupaten Pringsewu. Ketua dari Pringsewu Community yaitu Bapak Sucairi Heri Sibarani, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program minggu mruput yang terdapat di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu, merupakan perkembangan konsep pemerintahan yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring berjalannya waktu, salah satunya adalah dengan diterapkannya konsep "good goverannce" dengan menggabungkan keterkaitan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Mengingat belum adanya SK kegiatan ataupun payung hukum yang berlaku tentu terdapat beberapa problem dalam kegiatan tersebut diantaranya : keterbatasan modal dalam pengembangan ataupun pembangunan sarana prasarana pendukung, dan tidak adanya jaminan kegiatan tersebut akan terus ada dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan teori dalam partisipasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Basrowi dalam Astuti D dalam mengukur sejauh mana keterlibatan

kelompok sosial dan keberhasilan suatu program pemberdayaan pemerintah dinilai efektif. Banyak diterapkan pada organisasi publik maupun non publik, mulai dari partisipasi masyarakat pada pemerintahan desa dalam program pembangunan ataupun keterlibatan *civil society* pada lingkup pemberdayaan.

Dengan uraian permasalahan yang telah dijabarkan dan penggunaan teori partisipasi dapat digunakan menjadi alat ukur keterlibatan *civil society* Pringsewu Community yang cenderung mempunyai kinerja dan keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang baik dibandingkan dengan program kegiatan pemberdayaan lainnya baik yang dilatarbelakangi oleh pemerintah maupun kelompok sosial lainnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana partisipasi *civil society* dan keterlibatan stakeholder organisasi dalam mensukseskan program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan dan perubahan mindset masyarakat dengan judul “Partisipasi Civi Society dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kegiatan Minggu Mruput di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Istilah “governance” menurut Mulyadi (2015:129), menjelaskan governance telah lama dikenal baik dalam literatur administrasi dan juga politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut sekitar 125 tahun yang lalu. Pada saat itu governance hanya digunakan dalam lingkup organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi, dalam bahasa inggris governance diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan, tindakan atau aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat pada berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

Perkembangan konsep pemerintahan terus mengalami dinamika perubahan dan penyempurnaan, salah satunya adalah dengan adanya konsep “good governance” dengan menggabungkan keterkaitan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut Hardjasoemantri dalam Mulyadi (2015:133), prinsip good governance meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Partisipasi Masyarakat
Setiap masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Tegaknya Supremasi Hukum
Penerapan hukum dalam kehidupan bernegara harus diterapkan sesuai dengan ketentuan dan berlaku bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Transparansi
Transparansi terbentuk atas dasar informasi yang bebas dan keterbukaan.
- d. Peduli pada Stakeholder
Keseluruhan lembaga pemerintah harus bersifat melayani kepentingan masyarakat.
- e. Berorientasi pada Konsensus
Pemerintahan yang baik mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam semua aspek yang terbaik bagi kelompok masyarakat.
- f. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap program yang dijalankan pemerintah harus memberikan manfaat dan diterima baik oleh masyarakat dengan penggunaan waktu yang tepat.

- g. Akuntabilitas
Seluruh kegiatan yang dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada atasan maupun masyarakat.
- h. Visi Strategis

Partisipasi

Partisipasi termasuk dalam prinsip-prinsip dasar yang ada dalam good governance terkait betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintahan yang baik, Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi. Menurut Bornby dalam Theresia (2015:196), partisipasi adalah suatu tindakan untuk ikut menjadi bagian pada kegiatan guna mengambil bagian-bagian tersebut agar memperoleh manfaat.

Menurut Effendi sendiri, partisipasi merupakan awal dari komunitas yang berkembang yang mampu berjalan secara mandiri. Dilihat dari bentuknya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi secara Non Fisik
Partisipasi non fisik merupakan partisipasi yang melibatkan unsur masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan suatu kegiatan yang didukung semangat masyarakat yang tinggi. Secara konsep partisipasi non fisik dilakukan dengan tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir.
- b. Partisipasi secara Fisik.
Partisipasi masyarakat dalam bentuk mengadakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, seperti bentuk bangunan sekolah, penyediaan buku dan usaha pengadaan beasiswa. Partisipasi fisik dapat diartikan sebagai partisipasi yang nyata serta dapat dilihat berupa tenaga, keterampilan, uang dan lainnya.

Civil society

Muhammad AS. Hikam, mengatakan bahwa *civil society* adalah suatu kehidupan sosial yang terorganisasi dan mempunyai antara lain kesukarelaan keswasembadaan dan keterlibatan kemandirian yang tinggi dari masyarakat terhadap negara serta berkaitan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Tujuan Civil society

- a. Kemandirian individu
Sebagai warga negara yang baik tentu diharapkan bisa mengerti akan pentingnya keterlibatan mereka dalam memajukan bangsa Indonesia, kemandirian ini dapat diterapkan kepada masyarakat yang taat serta patuh hukum dan dapat menyampaikan pendapat secara demokratis guna terciptanya keadaan yang kondusif.
- b. Jaminan Hak Asasi Manusia
Tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Reublik Indonesia, dikatakan setiap warga Negara berhak mendapatkan jaminan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar warga negara dapat melakukan segala aktivitasnya dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
- c. Kebebasan bicara dan menyatakan pendapat
Civil society diharapkan dapat menjadi masyarakat yang patuh hukum dan memiliki nilai demokrasi dan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta menadi wadah aspirasi pendapat masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

- d. Keadilan yang Merata
Seluruh Warga Negara harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam semua bidang.
- e. Pembagian Sumber Daya Ekonomi
Dengan adanya pembagian ekonomi secara merata, masyarakat dapat hidup lebih mandiri serta tidak menggantungkan hidupnya kepada pemerintah dengan menunggu bantuan sosial ataupun subsidi dari pemerintah.

Fungsi *Civil society*

Pada hakekatnya fungsi dan tujuan adanya *civil society* adalah menjaga kesejahteraan dan mendukung program pembangunan pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Hadiwijoyo (2012:83), mengatakan bahwa *civil society* mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- a. *Civil society* mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pemerintah sebagai pelayan publik.
- b. *Civil society* dapat menjalankan aktivitas yang belum dilakukan negara ketika kebutuhan masyarakat belum tercukupi dan terpenuhi.
- c. *Civil society* sebagai kekuatan penyeimbang negara.

C. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai keadian yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan dan menafsirkan keadaan dilapangan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai “Peran *Civil society* Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kegiatan Ngggruput (Minggru Mruput) di Desa Klaten kabupaten Pringsewu”.

Penetapan fokus dalam fokus penelitian merupakan masalah yang berasal dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang didapatkan melalui kepustakaan ilmiah dan kepustakaan yang lainnya (Moleong 2014:97). Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada teori menurut Basrowi dan Astuti D. (2011:58) tentang bentuk partisipasi dan lingkup kegiatan yang produktif dalam pengembangan kapasitas pemberdayaan menurut Mardikanto dalam Theresia (2015:154-159).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan *civil society* dalam penyelenggaraan *Good governance* merupakan aksi nyata untuk mendorong dalam menunjang program pembangunan secara partisipatif. *Civil society* yang adalah sebagai penyeimbang dalam hal penyelenggaraan kehidupan bernegara dan merupakan bentuk kehidupan sosial yang terstruktur dengan prinsip kesukarelaan, kesuasembadaan.

Dalam hal pembangunan dan kesuksesan sebuah program keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam masalah ini Pringsewu *Community* adalah aktor yang mewakili masyarakat yang terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan konsep dan teori partisipasi yang diungkapkan oleh Basrowi dalam Astuti D. (2011:58) guna mengukur dan menganalisis seberapa besar keterlibatan pringsewu *communtiy* dan beberapa *stakeholder* serta apasajakah hambatan dan faktor pendukung

pringsewu *Community* dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan minggu mruput di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu.

Partisipasi Non Fisik

Partisipasi dalam Perencanaan

Wicaksono dan Sugiarto (wijaya, 2001) menjelaskan bahwa perencanaan yang bersifat partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat atau kelompok sosial dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada dengan harapan tercapainya kondisi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dan pringsewu *community* dalam perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan minggu mruput, analisis yang digunakan adalah berdasarkan :

Fokus perencanaan, berdasarkan masalah serta kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat agar saling menghargai, percaya, dan terbuka.

Tujuan dari kegiatan perencanaan partisipatif adalah:

- a. Adanya arah dan tujuan kegiatan yang jelas oleh masyarakat.
- b. Mengetahui saran dan perencanaan kegiatan yang berdasar pada potensi yang ada di masyarakat
- c. Mengetahui rencana program kegiatan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Pada prakteknya di Desa Klaten Kabupaten Pringsewu melalui kegiatan minggu mruput, perencanaan partisipatif diawali dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keluaran perencanaan pembangunan. Dalam tahapan ini banyak sebagian masyarakat yang merespon dengan baik terkait penawaran untuk bergabung menjadi pedagang pada kegiatan minggu mruput, namun banyak juga dari masyarakat yang menolak karena mereka sudah mempunyai pelanggan tetap di pasar tradisional.

Perencanaan yang diagendakan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas perwakilan saja dan masih banyak menimbulkan keraguan untuk ikut bergabung pada minggu mruput. Rendahnya partisipasi masyarakat pada awal pelaksanaan program pemberdayaan tidak hanya berasal dari faktor masyarakat tetapi ada beberapa kelemahan yang berasal dari pringsewu *community*.

Dari faktor masyarakat kendalanya adalah:

1. Keterbatasan masyarakat terkait pemahaman perencanaan maksud dan tujuan minggu mruput
2. Masih adanya sikap pesimis dalam hal profit mereka dan perkembangannya pada kegiatan minggu mruput
3. Mudah terprovokasi oleh pendapat masyarakat lain

Sedangkan kendala dari pringsewu *community* adalah:

1. Kurangnya sosialisasi penjelasan terkait kegiatan minggu mruput
2. kurangnya dukungan sumber daya manusia yang diandalkan

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan pringsewu *community* merupakan awal mula terbentuknya gagasan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelompok *civil society* yang berada di kabupaten pringsewu lahir dari kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama agar dapat bermanfaat bagi banyak orang dan bisa mengubah sebagian keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Keberadaan pringsewu *community* pun sesuai dengan manfaat dari *civil*

society yaitu menjalankan aktivitas atau kegiatan yang belum ada atau tidak dilakukan negara sebagai institusi yang menjadi pelayan bagi kepentingan masyarakat. Bentuk partisipasi yang dilakukan tentu tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir.

Menurut Teori Cohen dan Uphoff dalam (Sari, 2016) Partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan penentuan pilihan alternatif masyarakat untuk menuju kesepakatan tentang buah pikir yang menyangkut kepentingan umum. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu:

- a. Kehadiran rapat atau forum
- b. Diskusi dan sumbangan pemikiran

Kehadiran rapat atau forum

Kegiatan rapat yang dilakukan *pringsewu community* kepada para pedagang dilakukan pada tiap pelaksanaan minggu mruput di akhir bulan ataupun rapat dengan beberapa stakeholder secara formal. Tujuannya adalah selain menguatkan silaturahmi hal ini juga menjadi moment untuk menyampaikan pemaparan terkait program-program yang akan diadakan kedepannya. Undangan disampaikan secara terbuka kepada para pedagang dan beberapa stakeholder.

Diskusi dan sumbangan pemikiran

Diskusi merupakan pertukaran informasi dan pendapat guna mendapatkan sesuatu yang baru mengenai penyebab munculnya masalah dan mengetahui jalan keluarnya. Diskusi dilaksanakan dua orang atau lebih dengan harapan mampu memperoleh pemahaman yang sama dengan teliti dan jelas. Pada pelaksanaannya melalui kegiatan minggu mruput dikoordinasi oleh *pringsewu community* dengan peserta khususnya bagi para pedagang dan para pengunjung serta komuitas sosial umumnya. Pelaksanaannya diadakan setelah acara minggu mruput selesai yaitu pada pukul 10.30 wib. Adapun kegiatan berupa penyampaian pendapat maupun kritikan, keinginan daripada pedagang dan harapan kedepannya, serta masalah yang dihadapi selama pelaksanaan minggu mruput.

Berdasarkan fakta dilapangan kegiatan forum diskusi dan sumbangsih pikiran sangat berdampak pada kemandirian para pedagang dan inovasi yang terus berkembang. Keterbukaan serta gagasan atau buah pikir yang disampaikan membuat *pringsewu community* terus berbenah dan semangat dalam mengembangkan minggu mruput. Akan tetapi ada beberapa kekurangan terkait rapat dan diskusi penyampaian pemikiran, diantaranya:

1. Keadaan dan kondisi yang kurang kondusif, Mengingat pelaksanaannya setelah kegiatan minggu mruput.
2. Kehadiran para peserta yang tidak maksimal, dikarenakan banyak dari para pedagang yang melakukan aktifitas dan kesibukan pasca kegiatan minggu mruput.

Untuk mengatasi hal tersebut, *pringsewu community* berinisiatif membuat grup melalui *whatsapp* maupun *facebook* yang dikhususkan bagi para pedagang guna menjalin komunikasi yang lebih intens serta penyampaian ide maupun gagasan yang lebih efektif.

Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu cara untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu program.

Tujuan dari evaluasi untuk mengetahui berbagai macam kesalahan dan kekurangan suatu program yang dijalankan oleh organisasi agar dapat dijadikan pembelajaran dan perbaikan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dikemudian hari. Evaluasi juga bermanfaat dan berguna untuk perencanaan selanjutnya dengan memberikan kekurangan dan kendala, baik dalam hal administrasi maupun manajemen.

Beberapa tujuan evaluasi yaitu:

1. Mengetahui berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya
2. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap tupoksi yang telah ditetapkan
3. Sebagai alat ukur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan metode yang telah diterapkan.

Menurut (Cohen dan Uphoff dalam (Sari, 2016) Evaluasi program sangat penting sebagai peninjauan ulang terhadap hasil pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Partisipasi pada evaluasi sangat berkaitan dengan masalah pelaksanaan program.

- a. Menilai hasil program pemberdayaan
- b. Memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang bersifat membangun

Menilai hasil program pemberdayaan

Pringsewu *community* dalam hal evaluasi memberikan keterbukaan sepenuhnya kepada para pedagang dan pengunjung yang ingin menilai pencapaian program minggu mruput. Baik melalui forum ataupun secara langsung ketika pelaksanaannya dilapangan. Hal ini tidak lain untuk mengevaluasi kinerja secara internal keanggotaan organisasi pringsewu *community* maupun pelaksanaan minggu mruput. Metode yang diterapkan adalah mendatangi langsung kepada pedagang terkait arahan maupun kekurangan yang harus diperbaiki dan pada saat pelaksanaan rapat maupun pelaksanaan seminar dan arahan program pemberdayaan.

Memberikan saran dan kritik dari pelaksanaan program pemberdayaan

Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penting guna membangun suatu organisasi ataupun suatu program kearah yang lebih baik. Azas keterbukaan dan transparansi guna menampung aspirasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dalam prakteknya dilapangan pringsewu *community* selalu menjunjung aspek keterbukaan. Mengingat banyaknya pedagang dan pengunjung sehingga banyak beberapa aspirasi yang tidak tersampaikan secara langsung, mengingat keterbatasan waktu dan tempat. Tetapi banyak dari mereka yang paham dan menggunakan perantara media sosial guna mempermudah akses mereka. Dan aspek *responsibilitas* juga penting untuk merespon aspirasi masyarakat dengan baik. Pringsewu *community* melalui admin grup dan instruksi dari founder mengarahkan pada setiap anggotanya baik dilapangan maupun pada grup agar senantiasa merespon dan mengarahkan setiap keluhan kesah maupun pendapat yang masyarakat sampaikan dan ini sudah berjalan cukup efektif.

Adapun hasil yang didapatkan atau manfaat dari evaluasi pada program minggu mruput yaitu :

- a. Pendapat masyarakat dan pengunjung dapat tersampaikan
- b. Kegiatan minggu mruput berjalan secara terbuka dan transparan
- c. Program kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan dan bervariasi
- d. Sebagai tolak ukur pencapaian dari pringsewu *community*

Konsultasi/Konseling Bagi Para Pedagang

Konsultasi merupakan sarana untuk memberikan bantuan pada seseorang maupun organisasi yang dilakukan oleh para ahli sesuai dengan bidangnya dengan harapan mampu menyelesaikan masalah yang ada secara tepat.

Menurut Zins, konsultasi adalah kegiatan yang didasarkan pada keterkaitan hubungan dengan beberapa pihak diikuti dengan adanya rasa saling percaya serta komunikasi yang baik dan terbuka untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya. Beberapa proses-proses konsultasi diantaranya :

1. *Provision*, yaitu konsultan dapat berperan sebagai pelayan secara langsung kepada konsultee yang tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian konsultan akan memberi saran supaya mendapatkan perubahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam tahapan ini pringsewu *community* melakukan arahan kepada para pedagang pada saat pelaksanaan minggu mruput agar ketika mereka mempunyai suatu masalah atau hambatan dapat melakukan sharing maupun diskusi pasca kegiatan minggu mruput, ataupun melalui grup dan juga dapat menemui langsung ke rumah jika keadaan memang sangat urgent
2. *Prescription*, yaitu konsultan akan memberikan saran dan arahan kepada konsultee, tetapi membatasi dirinya untuk tidak terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang dialami konsultee. Seiring berjalannya kegiatan minggu mruput banyak problematika yang dihadapi oleh para pedagang baik yang sifatnya urgent maupun sederhana. Dalam hal yang sifatnya urgent, pihak pringsewu mempersilahkan kepada pedagang untuk menemuinya dirumah. Dalam hal ini contoh yang bersifat urgent adalah terkait problem keuangan dalam rumah tangga, dan juga masalah-masalah lainnya. Tindakan yang dilakukan pringsewu *community* hanyalah sebatas pengarahan ataupun pinjaman modal maupun bentuk lainnya untuk berikutnya diserahkan kepada pedagang agar dijalankan sesuai kemampuan dan kesanggupan mereka.
3. *Collaboration*, mempunyai arti konsultan dan konsultee akan melakukan hubungan kerja sama untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam kegiatan pemberdayaan, beberapa permasalahan secara kompleks yang terjadi dilapangan terkadang tidak dapat dicover secara menyeluruh oleh pringsewu *community*. Mengingat keterbatasan kapasitas dan kemampuan dari Sumber Daya Manusia yang ada. Untuk itu pringsewu *community* melakukan *connecting* dengan beberapa stakeholder sesuai dengan kapasitasnya agar dapat memberikan pengarahan dan pemecahan permasalahan yang ada.

Berdasarkan pembahasan diatas keterkaitan pringsewu *community* dalam melakukan pendampingan dan pemecahan masalah sudah menerapkannya dengan baik, hal ini didukung oleh keterlibatan beberapa stakeholder. Tetapi ada beberapa hambatan yang tidak dapat dipenuhi ataupun diselesaikan oleh pringsewu *community* terutama dalam hal kebutuhan financial yang bersifat mendesak dan dalam nominal yang cukup banyak.

Dari hasil pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan konsep pemerintahan mengalami pembaharuan dalam berbagai bidang, salah satunya dengan adanya konsep “*good governance*” dan dalam hal ini pringsewu *community* membantu tercapainya pemerintahan yang baik dengan menjalankan dan menggabungkan keterkaitan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat. Dimana aspek partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi kunci keberhasilan dari suatu program

pemberdayaan.

Partisipasi Fisik

Bentuk partisipasi secara fisik adalah bentuk partisipasi masyarakat dengan cara menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk kepentingan masyarakat, sarana prasarana seperti gedung, penyediaan buku dan usaha. Mengenai partisipasi fisik yang dilakukan pringsewu *community* tentu bekerjasama penuh dengan pemerintah kabupaten Pringsewu.

Terdapat 2 hal yang menjadi acuan program prioritas dari pembangunan yang dikoordinasi oleh pringsewu *community* yaitu :

1. Portal keluar masuk menuju lokasi minggu mruput dan kompleks perkantoran. Tujuan dari pengadaan pembuatan portal keluar masuk tidak lain adalah memudahkan controlling keamanan dan keterlibatan serta terciptanya rasa aman dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pengadaan portal keluar masuk telah terealisasi dan berjalan efektif.
2. Pembuatan toilet non permanent
Pengadaan toilet non permanent merupakan tindak lanjut dari pendapat masyarakat sekaligus hasil musyawarah bersama guna menunjang kenyamanan para pengunjung. Akan tetapi pembuatan toilet non permanent belum terealisasi hingga saat ini, dikarenakan :
 - a. Anggaran pringsewu *community* yang terbatas
 - b. Perlu adanya izin dan kesepakatan dari pemerintah
 - c. Lokasi yang masih bersifat umum, dalam artian ruas jalan digunakan atau dilalui pegawai dan warga pada hari kerja sebagai akses menuju perkantoran pringsewu.

E. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil pembahasan yang dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu minggu mruput yang berlangsung pada tiap minggu pagi dan berlokasi di desa klaten kabupaten pringsewu dinilai sangat efektif terutama dalam hal memecahkan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah utamanya dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan masalah lainnya seperti kesenjangan sosial. Hal ini dibuktikan dengan bertransformasinya keadaan masyarakat yang lebih mandiri dan inovatif.
2. Kegiatan ini mampu bertahan dan terus berkembang berkat adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar stakeholder yang diinisiasi oleh pringsewu *community*. Pringsewu *community* merupakan masyarakat sipil yang berorientasi pada kepentingan umum bukan tujuan pribadi. Dalam pelaksanaannya pringsewu *community* menerapkan prinsip *good governance* yaitu dengan menggabungkan keterkaitan tiga pilar utama yaitu pemerintah, korporasi dan masyarakat
3. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan, diantaranya
Faktor pendukung :
 - a. Letak geografis yang strategis
 - b. Atraksi / Daya tarik yang ditawarkan kepada pengunjung
 - c. Partisipasi Masyarakat yang tinggiFaktor penghambat

Faktor Internal:

- a. Belum adanya SK kegiatan/ payung hukum
- b. Regulasi yang bersifat sederhana
- c. Sumber dana

Faktor eksternal :

- a. Koordinasi yang kurang berjalan maksimal dengan Lembaga atau Instansi Terkait
- b. Covid 19 yang melanda Indonesia

Saran

1. Saran bagi Pringsewu *Community*

Agar dipertahankan segala sesuatu yang telah dicapai berikut dengan system manajemen yang dijalankan. Perbaiki segala sesuatu kekurangan baik internal organisasi maupun dari sisi eksternal, serta kritik dan saran yang disampaikan baik oleh para pedagang, pengunjung, stakeholder, dan masyarakat luas. Kemudian lebih diperhatikan dari sisi keberlangsungan dan eksistensi minggu mruput untuk jangka panjang terlebih keterkaitan kerjasama dengan pemerintah kabupaten maupun dinas lain yang terkait. Walaupun dari pihak internal Pringsewu *Community* tidak menginginkan atau mengizinkan kegiatan minggu mruput di SK-kan setidaknya ada kejelasan kontrak kerjasama atau nota kesepahaman agar kedepan dalam penyamaan persepsi dan pencapaian visi misi lebih baik lagi.

2. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Lebih responsive dalam merespon pengaduan dan masukan serta segera untuk menindaklanjutinya. Terutama dalam hal yang sifatnya financial seperti pengadaan toilet non-permanent yang berfungsi untuk menunjang kenyamanan bagi pengunjung. Mengadakan pembahasan baik dengan dinas pariwisata kabupaten dan juga dinas pariwisata provinsi agar menjadikan minggu mruput sebagai icon wisata tradisional berbalut nuansa alam dan menjadikannya sebagai kalender program pariwisata tahunan.

3. Saran bagi Diskooperindag dan Dinas Kesehatan

Pengadaan program pelatihan dan monitoring agar semakin digiatkan. Kegiatan sidak lapangan yang dilakukan dinas kesehatan untuk memastikan makanan yang sehat dirasa efektif guna menekan kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dalam hal pembuatan makanan

4. Saran bagi Pedagang dan Pengunjung

Tetap jaga semangat dalam berpartisipasi aktif dan saling menjaga persaudaraan serta rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Untuk para pedagang sangat terbuka lebar bagi mereka yang ingin mengajak kerabat, saudara untuk menjadi pedagang dan bagian dari minggu mruput dengan catatan mau mematuhi aturan sederhana yang telah dijalankan. Bagi para pengunjung agar senantiasa mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan mulai dari menerapkan protocol kesehatan di situasional saat ini dan menumbuhkan rasa kesadaran terutama dalam hal kebersihan untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terakhir, sikap agar selalu mendukung, dengan cara hadir pada minggu mruput, membeli makanan pedagang dan berdonasi. Dari hasil pembahasan yang dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti D, Siti Irene 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. . Hikmat, Mahi M. 2011. Metode Penelitian: dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta:Grahallmu.
- Ahmadi, r. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Yogyakarta: ar-ruz media.
- Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi, dan *Civil society*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Jakarta: Bappenas.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung, Alfabeta
- Meiliyana, dkk. 2016. Koordinasi Antar Organisasi Dalam Pengelolaan Purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lampung. Universitas Lampung
- Rakhmat. (2017). Administrasi dan Akuntabilits Publik. Yogyakarta. ANDI.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Skripsi dan Karya Ilmiah**
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifiartiningasih. 2015. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.
- Ambarwati, Eva. 2016. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponogoro.
- Fahrudin, Adi, Ph. D. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora.
- H, Assumpta, 2016. Praktek Pembedayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta.
- Rukminto, Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa inovasi dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”. Bandung: Mandar Maju
- Theresia, Aprilia, Dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat des.

